

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Tahan Kajian Awal Penjualan Saham Pabrik Bir

Menurut Gubernur, pemerintah DKI wajib mengontrol peredaran minuman beralkohol.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah DKI Jakarta berkeras akan melakukan *due diligence* atau uji tuntas tentang pelepasan 26,25 persen saham PT Delta Djakarta hanya jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta menyetujui kebijakan tersebut. Bahkan, hasil uji awal rencana itu pun tak dibagikan ke Dewan.

Pelaksana tugas Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, Riyadi, mengatakan uji tuntas hanya memboroskan keuangan daerah jika dilakukan tanpa persetujuan DPRD. "Misalnya, Dewan enggak setuju (melepas saham), kan (uji tuntas) jadi percuma," ujar dia di gedung DPRD DKI, kemarin.

Dia menjelaskan, perlu biaya besar untuk melakukan uji tuntas pelepasan saham di PT Delta yang meliputi aspek yuridis, finansial, dan sosiologis. Jika Dewan menyetujui pelepasan saham Delta, pemerintah DKI akan

segera melaksanakan *due diligence*. Namun DKI telah memiliki kajian awal yang disusun pada tahun lalu oleh lembaga independen. Hasilnya, penjualan saham pabrik bir itu direkomendasikan.

"Kalau belum ada kajiannya, kami enggak surat Dewan," kata Riyadi.

Hingga kemarin, Dewan tak kunjung menyepakati pelepasan saham tersebut. Mayoritas legislator Kebon Sirih—lokasi gedung DPRD DKI—berkeras tak mau membahas permintaan pemerintah DKI tersebut. Gubernur DKI Anies Baswedan pun telah dua kali melayangkan surat permintaan persetujuan, yakni pada Mei 2018 dan akhir Januari lalu.

Anggota Komisi Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta, Ruslan Amsyari, mempertanyakan kajian awal yang kabarnya telah dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Kalau kajian itu memang ada, dia melanjutkan, DKI diminta segera memberikannya kepada DPRD sebelum membahas usul pelepasan saham PT Delta secara resmi.

"Jangan kajiannya dikan-

tongi sendiri," ujar politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu, kemarin.

Menurut Ruslan, dengan kepemilikan saham di PT Delta yang cukup signifikan itu, pemerintah DKI justru bisa ikut mengawasi peredaran minuman beralkohol produksi PT Delta. Sebagai pemegang saham, DKI memiliki perwakilan di dewan komisaris PT Delta.

Adapun Gubernur Anies menilai rencana penjualan saham tak memerlukan kajian yang rumit. Dia juga berpendapat pemerintah Jakarta seharusnya tak menaruh saham di bidang usaha yang tak berpotensi membangun daerah. "Pemerintah itu prinsipnya meletakkan uang di badan usaha yang sifatnya membangun, seperti bank dan perusahaan konstruksi," ujar dia, kemarin.

Dia bahkan menganggap terjadi konflik kepentingan jika pemerintah DKI memiliki saham di perusahaan bir. Anies mencontohkan, PT Delta akan menyetorkan lebih banyak dividen bagi pemerintah Jakarta jika penjualan bir meningkat. Padahal, menurut dia, pemerintah DKI memili-

ki kewajiban mengontrol peredaran minuman beralkohol tersebut.

Riyadi pun menjelaskan pelepasan saham PT Delta dilakukan untuk optimalisasi aset. Penjualan tersebut akan menghasilkan uang Rp 1,2 triliun yang bisa digunakan pemerintah DKI untuk berbagai program pembangunan, seperti menambah jaringan pipa air bersih, memperbaiki sekolah yang rusak, atau membangun Jakarta International Stadium. "Masyarakat luas bisa segera merasakan manfaatnya."

Jika mempertahankan sahamnya, dia melanjutkan, pemerintah daerah hanya menerima dividen setiap tahun. Pada 2017 perusahaan bir itu menyetorkan dividen kepada pemerintah DKI sekitar Rp 37 miliar. Riyadi memaparkan, seandainya dana hasil penjualan saham pabrik bir Rp 1,2 triliun didepositokan dengan bunga 5 persen setiap tahun, pemerintah DKI diperkirakan memperoleh Rp 60 miliar setiap tahun. Jumlah itu lebih besar dibanding dividen yang disetorkan oleh PT Delta setiap tahunnya.

● JULNIS FIRMANSYAH

Bulan :

1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 **14** 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Tahan Kajian Awal Penjualan Saham Pabrik Bir

Silang Pendapat Pelepasan Saham

Alih-alih beradu argumentasi dalam forum resmi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah justru kerap bersilang pendapat ihwal pelepasan saham PT Delta Djakarta melalui media massa. Berikut ini kutipan pernyataan mereka:



TEMPO/MAM SUKAWITO

“Mau dijual Rp 1 triliun, kita makan riba.”

Prasetyo Edi Marsudi
Ketua DPRD Jakarta



TEMPO/M TAUFAN REINGGANIS

“Ada potensi *conflict of interest*. Kalau dividennya lebih banyak, berarti penjualan (bir) meningkat. Di sisi lain, kami punya kepentingan mengontrol (peredaran bir).”

Anies Baswedan
Gubernur DKI



TWITTER.COM/SARMANSIMANJONG1

“Ini bukan soal untung atau rugi, melainkan setiap pemimpin punya arah kebijakan masing-masing. Dan pemerintah saat ini punya rencana lain soal uang di saham itu.”

Sarman Simanjanong
Komisaris Utama PT Delta Djakarta



DOK TEMPO/EKO SISWONO TOYUDHO

“Tak pernah ada lobi, tak pernah ada pertemuan, tak pernah ada penjelasan. Tiba-tiba bilang DPRD tak mau jual saham bir.”

Bestari Barus
Ketua Fraksi NasDem



TEMPO/STR/M IOBAL ICHSAN

“Kami akan coba mensosialisasi ke kawan-kawan fraksi lain di DPRD agar mereka paham, jauh lebih penting melepas saham itu.”

Mohamad Taufik
Wakil Ketua DPRD dari Partai Gerindra

● GANGSAR PARIKESIT | PELBAGAI SUMBER